

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Singapura merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki perekonomian maju diantara negara-negara lain yang sedang berkembang. Kemajuan perekonomian Singapura ini tidak lepas dari letak geografis Singapura yang berada di Selat Malaka. Selat Malaka termasuk dalam selat internasional di mana Selat Malaka merupakan salah satu selat internasional terpenting di dunia, disamping itu selat ini juga merupakan selat tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz.<sup>1</sup> Jalur ini merupakan rute perdagangan maritim yang sangat penting karena menghubungkan antara ladang minyak yang berada di Timur Tengah dan negara-negara ekonomi industri besar seperti China, Jepang dan Korea Selatan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla), Laksdya TNI Desi Albert Mamahit bahwa Sepertiga perdagangan dunia yang menggunakan sarana transportasi laut, melalui Alur Selat Malaka dilalui lebih dari 60 ribu kapal dalam

---

<sup>1</sup>Karakteristik dan permasalahan Selat Malaka, M. Saeri, diakses dari <http://ejournal.unri.ac.id> tanggal 4 Desember 2014 pukul 13:43.

satu tahun.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Selat Malaka merupakan salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia.

Karena lokasi Singapura yang berada di Selat Malaka, ekonomi Singapura juga terus tumbuh seiring dengan bertambahnya lalu lintas perdagangan yang melalui kawasan ini. Setelah kemerdekaannya di tahun 1965, Singapura dibawah pimpinan Lee Kwan Yew menjelma sebagai sebuah negara dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat di kawasan Asia Tenggara yang menjadikannya sebagai salah satu macan Asia. Singapura tercatat sebagai negara terkaya keempat setelah Swiss, Jepang, dan Norwegia di tahun 1997.

Selain itu, Singapura merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dalam hal penyerapan investasi asing langsung (FDI). FDI di Singapura meningkat 31,6 persen sepanjang tahun 2011, menembus US\$ 64 miliar, yang merupakan 54,7 persen total FDI negara-negara ASEAN. Keunggulan Singapura dalam hal penyerapan modal asing adalah perpajakan yang rendah dan sistem hukum yang kondusif. Sementara itu, investasi langsung dari Singapura di luar negeri juga mengalami pertumbuhan pesat, yang sebesar US\$ 25,2 milyar sepanjang 2011, atau naik 19 persen. Investasi Singapura di kawasan ASEAN juga semakin meningkat.<sup>3</sup>

Setelah peristiwa yang meruntuhkan gedung kembar *World Trade Center* (WTC) di New York dan pentagon di Washington D.C pada 11 September

---

<sup>2</sup>Sepertiga perdagangan dunia melalui selat malaka, <http://www.tribunnews.com/regional/2014/09/10/sepertiga-perdagangan-dunia-melalui-selat-malaka> di akses tanggal 17 Oktober 2014 pukul 19:41

<sup>3</sup>Asia Tenggara jadi incaran investasi asing, <http://indonesian.cri.cn/201/2012/08/16/1s130446.htm> diakses tanggal 17 Oktober 2014 pukul 20:50.

2001, terorisme menjadi isu keamanan yang paling menyita perhatian berbagai aktor politik internasional baik negara maupun non negara. Hal ini, karena adanya perubahan agenda dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001. Seiring dengan adanya kampanye “*War on Terrorism*” yang di deklarasikan AS, kini seluruh negara di dunia sedang berperang melawan terorisme. Asia Tenggara merupakan salah satu contoh wilayah yang sangat serius mengatasi ancaman terorisme. Wilayah ini menjadi ‘*second front*’ setelah banyaknya peristiwa terorisme yang terjadi di kawasan ini seperti Bom Bali I dan II, ledakan Bom di Hotel JW Marriot, ledakan Bom di Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia dan beberapa ledakan yang terjadi di tempat-tempat peribadatan di Indonesia. Dengan banyaknya peristiwa terorisme di kawasan Asia Tenggara, Amerika mengimplementasikan kampanyenya dalam Perang Global Melawan Teror. Maka tidaklah mengherankan apabila wilayah Asia Tenggara juga menjadi target serangan para teroris dalam melakukan aksi-aksi terorisme.

Ancaman terorisme merupakan ancaman yang sulit untuk diidentifikasi dan sulit untuk diatasi. Hal ini karena terorisme merupakan suatu bentuk ancaman yang sulit untuk diidentifikasi siapa pelakunya, sebab aktor utama yang menjalankannya bukan negara melainkan individu atau kelompok. Jaringan terorisme saat ini sudah “beranak pinak” membentuk jaringan yang sangat luas yang sulit untuk di deteksi keberadaannya.

Ancaman terorisme ini sering kali dikaitkan dengan Islam yang sebagian besar pelakunya berasal dari kalangan muslim-radikal. Hal inilah yang menyebabkan AS menjadikan Asia Tenggara sebagai target bagi kampanye anti-

terorisme yang di lancarkan oleh Presiden George W. Bush. AS dan sekutunya menjadikan Asia Tenggara sebagai target kampanye anti-terorisme di latar belakang oleh dua faktor. *Pertama*, mayoritas penduduk di kawasan ini beragama Islam, yakni agama yang sama yang di peluk oleh Osama Bin Laden yang dituduh oleh pemerintah AS sebagai dalang di balik peristiwa 11 September 2001 terhadap New York dan Washington D.C. *Kedua*, di kawasan Asia Tenggara ini memang terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Filipina.<sup>4</sup>

Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa negara-negara di ASEAN terdapat kelompok-kelompok aliran keras. Di Indonesia terdapat Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin, Hisbut Tahrir dan Laskar Jihad. Akan tetapi, tingkat kekerasan mereka lebih terfokus pada lingkup Indonesia dan tidak menyebarkan gerakan kekerasan di luar Indonesia. Di Philipina, kelompok Abu Sayyaf juga dikenal keras, namun selama ini agenda mereka terbatas pada kawasan Mindanao.<sup>5</sup>

Kemunculan Islam garis keras khususnya di Indonesia di latar belakang oleh beberapa faktor. Pertama, faktor pemahaman keagamaan literal yang telah mengakibatkan adanya kecenderungan “keras” dalam mempraktekkan agama. Kedua, adanya interaksi muslim Indonesia dengan muslim Internasional, sumber informasi melalui media dan internet atau yang di fasilitasi oleh mobilitas Muslim

---

<sup>4</sup>Bambang Cipto, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 237.

<sup>5</sup>Ibid, hal. 238.

Indonesia ke luar negeri baik melalui jalur kerja (seperti ke Arab Saudi atau Malaysia) atau dengan misi-misi kemanusiaan atas nama solidaritas sesama Muslim (seperti yang terjadi di Afghanistan dan Mindanao). Ketiga, demokrasi tidak dapat lagi di bendung bagi negara yang berpaham literal.

Jaringan terorisme di Asia Tenggara mulai terbentuk setelah para teroris (penggiat gerakan radikal Islam) di Indonesia mulai ber-eksodus ke Malaysia. Dengan menggunakan strategi *Clandestine* mereka membentuk pola jaringan yang rapi dan terstruktur dengan tetap berpusat di Malaysia. Hal inilah yang kemudian membentuk jaringan terorisme dan serangkaian aksi terorisme yang meliputi kawasan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura.

Jaringan terorisme di kawasan Asia Tenggara diyakini melibatkan Jemaah Islamiyah (JI). JI merupakan jaringan yang masih terkait dengan jaringan terorisme Al-Qaeda yang diduga melakukan serangan pada gedung WTC dan Pentagon. Jemaah Islamiyah adalah jaringan yang diduga melakukan tindakan terorisme di kawasan Asia Tenggara seperti tragedi Bom Bali dan kegiatan teror di Asia Tenggara pada beberapa waktu belakangan ini.

Jemaah Islamiyah didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan anggota dari Darul Islam dan saat itu melarikan diri dan berlindung di Malaysia. Kegiatan JI semakin radikal setelah Abdul Wahid Kadungga bergabung dengan kelompok ini. Kadungga merupakan menantu dari Kahar Muzakar yang disebut-sebut memiliki koneksi dengan Osama bin Laden.

Tujuan kelompok ini tidak lagi memperjuangkan Darul Islam tetapi menginginkan kembalinya kekhalifahan Islam di Asia Tenggara.<sup>6</sup>

Dr. Azahari dan Noordin M. Top merupakan warga negara Malaysia yang menjadi dalang aksi terorisme yang terjadi di Indonesia seperti Bom Bali I dan II, Bom di Hotel J.W Marriot. Hal ini di ungkapkan oleh kepolisian RI bahwa Dr. Azahari adalah orang yang bertindak sebagai pembuat bom, sedangkan Noordin M. Top adalah orang yang bekerja untuk merekrut para korban bom bunuh diri. Hal ini menimbulkan persepsi masyarakat di Asia Tenggara bahwa Malaysia adalah negara produsen terorisme.

Di Singapura menurut Perdana Menteri Goh Chok Tong, Jemaah Islamiyah memiliki beberapa operator yang tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Singapura meyakini bahwa operator-operator Jemaah Islamiyah juga ada di Indonesia, sebab di Asia Tenggara terdapat kurang lebih 5000 operator Jama'ah Islamiyah dan sebagian besar pernah mengikuti pelatihan di Afghanistan.<sup>7</sup>

Kemunculan Jemaah Islamiyah di Singapura bermula dari Ibrahim Maidin, seorang pemikir dan alim ulama yang berkharisma. Keikutsertaannya dalam jaringan ini di dorong oleh Abu Jibril. Ibrahim Maidin kemudian menjadi pengikut dari Abu Bakar Ba'asyir dan kemudian mengikuti pelatihan militer di Afghanistan pada tahun 1993. Ibrahim Maidin kemudian menjadi pemimpin JI di

---

<sup>6</sup>Fahrudin, Fenomena Jama'ah Islamiyah di Asia Tenggara: Sebuah gerakan jihad internasional, diakses dari <http://file.upi.edu> tanggal 22 April 2015 pukul 17:15.

<sup>7</sup>Ibid.

Singapura hingga tahun 1999. Ia merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam pengembangan JI di Singapura. Dia sendiri yang merekrut dan mendidik para anggota JI di Singapura, salah satu muridnya Mas Selamat Kastari kemudian mengambil alih kepemimpinan JI di Singapura dari Ibrahim Maidin.

Singapura adalah salah satu negara yang memiliki potensi ancaman terorisme yang tinggi. Hal ini lantaran jaringan pemerintah Singapura mendukung langkah AS terhadap Perang Global Melawan Terorisme. Selain itu, potensi ancaman terorisme di Singapura dapat dilihat dari kondisi geografis Singapura. Secara geografi Singapura sebagai sebuah negara yang paling kecil dan minim akan sumber daya di kawasan Asia Tenggara merasa terancam dengan keadaan ini. Selain itu, negara ini berada di antara dua negara besar yakni Indonesia dan Malaysia yang penduduknya mayoritas adalah etnis melayu sedangkan mayoritas penduduk Singapura adalah etnis Cina yang menjadi minoritas di antara kedua negara tersebut. Singapura selalu merasa berada di tengah ancaman yang tak menentu dengan jumlah penduduk hanya sebesar 5 juta jiwa, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk negara-negara tetangga. Disamping itu, penduduk Muslim di Singapura cukup besar yakni 14,9%. Dengan besarnya jumlah penduduk Muslim di Singapura, pemerintah memiliki kekhawatiran bahwa Singapura menjadi tempat tumbuhnya terorisme (*homegrown terrorism*).

Meskipun hingga saat ini Singapura tidak menghadapi ancaman ataupun serangan terhadap masalah terorisme, namun Singapura tetap memandang bahwa mereka akan selalu berada dibawah ancaman terorisme meskipun Singapura tidak

tahu kapan ancaman itu akan mengancam negara-kota ini. Singapura terus berupaya menjaga keamanan nasional negaranya dari ancaman terorisme.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah **“Bagaimana strategi pemerintah Singapura dalam mengantisipasi ancaman terorisme?”**

## **C. Kerangka Teori**

Untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana strategi pemerintah Singapura dalam mengantisipasi ancaman terorisme, penulis menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan pendekatan Terorisme Internasional, *Counterterrorism*, dan de-radikalisasi.

### **1. Terorisme Internasional**

Pasca peristiwa 11 September 2001 terorisme menjadi isu keamanan yang rumit bagi dunia internasional karena adanya perubahan agenda dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) karena peristiwa tersebut. Terorisme internasional menurut Dougherty dan Pfaltzgrff<sup>8</sup> adalah sebuah bentuk dari konflik dengan skala rendah yang berhasil menarik perhatian pemerintah pada beberapa tahun belakangan ini. Aksi yang dilakukan oleh para teroris ini berbeda-beda, diantaranya aksi-aksi pengeboman, penculikan, pembunuhan, pembajakan, pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik, penyanderaan, dan lain sebagainya. Aksi-aksi ini dilakukan dengan berbagai macam motivasi, diantaranya kebebasan

---

<sup>8</sup> James E Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations: a comprehensive survey* (United States; Addison Wesley Longman, Inc, 1997), 310.



nasional, iredentisme, dan pemisahan diri. Selain itu juga terdapat motivasi lain seperti tujuan ideologis, aksi terorisme terhadap pemerintahan yang sedang menjabat, perusahaan-perusahaan multinasional, kapitalisme dan sosialisme, serta kemarahan para revolusioner agama terhadap musuh-musuh yang keras. Begitu sulit sebenarnya para teoritikus dalam mendefinisikan secara pasti apa yang disebut terorisme internasional, sebab hal ini memerlukan strategi yang efektif dalam melihat isi dari penyebarannya dan menaksirkan dampak terhadap perilaku negara dan sistem internasional.

Terorisme merupakan istilah yang merendahkan. Sebuah kata yang secara intrinsik berkonotasi negatif yang secara umum disematkan atas musuh suatu pihak atau kepada seseorang yang tidak sepakat dengannya dan karenanya ingin disingkirkan. Menurut Brian Jenkins, apa yang disebut sebagai terorisme tergantung pada sudut pandang seseorang. Jika salah satu pihak berhasil menyematkan label teroris kepada lawannya, maka secara tidak langsung ia telah membujuk pihak lain untuk mengadopsi sudut pandang moralnya tersebut.<sup>9</sup>

Istilah teroris yang populer bagi seseorang adalah pejuang kemerdekaan bagi yang lain. Hal ini mencerminkan terhadap banyaknya masalah yang dihadapi untuk mendefinisikan terorisme. Berbagai kata banyak digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang melakukan terorisme. Mereka menggunakan beberapa istilah seperti para radikal, fundamentalis, orang gila yang jahat, musuh-musuh demokrasi, musuh kebebasan, pemberontak, tiran, pembunuh, hingga

---

<sup>9</sup>TERORISME & terorisme, Antara “T besar” dan “t kecil”, Lembaga Kajian Syamina [syamina.org](http://syamina.org), di akses tanggal 11 November 2014 pukul 12:36.

penjahat dan pembunuh yang beroperasi di jaringan gelap. Pendefinisian terhadap siapa itu teroris juga tidak kalah sulit dengan definisi terorisme.

Teroris dengan kekuatan yang cukup kuat mampu menyerang negara dengan pemerintahan yang lemah. Namun, kekuatan teroris masih belum bisa membendung kekuatan dari negara yang memiliki kemampuan yang kuat (*great power*). Negara *great power* mampu menggagalkan dan mempermalukan para teroris dengan membuatnya terlihat tidak berdaya dengan kekuatan lebih besar yang dimilikinya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah di negara-negara barat dengan memboikot negara-negara seperti Iran, Libya, Syiria, dan Iraq yang dinilai sebagai negara-negara yang membiayai dan mendukung kegiatan para teroris ini. Dengan melihat hal itu, para pemimpin negara memberikan sanksi kepada negara-negara tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk membalas perilaku para teroris. Respon yang efektif terhadap perilaku para teroris tidak hanya berdasarkan pada elemen-elemen politik, budaya dan agama, tetapi juga berdasarkan sikap terhadap pembenaran hukum dan moral dengan menggunakan kebijakan yang bervariasi dalam masyarakat internasional

Di Singapura, jaringan terorisme internasional Al-Qaeda direpresentasikan oleh unsur-unsur yang menamai dirinya Jemaah Islamiyah (JI) yakni sebuah kelompok militan islam yang terdapat di beberapa negara di Asia Tenggara, dimana kelompok ini berusaha untuk mendirikan negara islam di kawasan ini. JI dibentuk oleh kelompok separatis dari gerakan Darul Islam Indonesia yang melarikan diri ke Malaysia dan membentuk basis di Malaysia.

Kelompok ini menjadikan AS dan barat yang berada di Indonesia, Singapura, dan Filipina sebagai target sasaran serangan. Keberadaan anggota JI di Singapura ini tidak pernah diketahui sebelumnya sampai seorang anggota dari komunitas muslim di Singapura melapor ke *Internal Security Department (ISD)*, tentang adanya keterlibatan warga Singapura terhadap jaringan Al-Qaeda.

Aksi terorisme yang beberapa tahun belakangan ini marak terjadi di berbagai belahan negara di dunia serta jangkauannya yang makin meluas, hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab mengapa terorisme menjadi isu strategis. Isu terorisme menjadi isu *high politics* dan menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dalam forum-forum kenegaraan khususnya dalam forum keamanan internasional karena ancaman terorisme sama pentingnya dengan ancaman dalam perspektif keamanan tradisional.

Singapura dalam memandang ancaman terorisme ini berdasarkan pada pemahaman yang benar terlebih dahulu mengenai definisi dan karakteristik ancaman terorisme internasional yang dihadapi oleh Singapura. Karena hal ini berbeda dengan ancaman terorisme pada masa lalu. Terorisme internasional menggunakan metode yang baru yakni bahaya ancaman yang berlangsung dalam jangka panjang (*long-term peril*), dimana dengan waktu yang lama ini mereka membentuk ideologi yang lebih mengakar lagi. Kelompok teroris ini memiliki kemampuan yang baik dalam kalkulasi strategis.

## 2. Counterterrorism

Setelah peristiwa runtuhnya gedung kembar *World Trade Center* (WTC) di New York dan sebagian gedung Pentagon di Washington D.C oleh serangan Al Qaeda pada 11 September 2001 perhatian dunia internasional telah tertuju pada isu terorisme. Peristiwa ini kemudian menandai babak baru dimana ancaman terorisme global menjadi ancaman yang nyata terhadap keamanan nasional sebuah negara. Setiap negara kini mencari sebuah strategi baru dalam mengantisipasi ancaman terorisme, strategi tersebut dikenal dengan *counterterrorism*.

Definisi dari pemerintah AS mengenai *counterterrorism* (selanjutnya disingkat CT) adalah aktivitas dan operasi yang dilakukan untuk menetralkan para teroris, organisasi-organisasinya, dan jaringan-jaringannya agar mereka tidak menggunakan kemampuannya dan penggunaan ancaman untuk menimbulkan ketakutan dan memaksa pemerintah atau masyarakat untuk mencapai tujuannya.<sup>10</sup>

Hal-hal yang menjadi dasar dalam *counterterrorism* meliputi prinsip-prinsip, aktivitas-aktivitas, dan operasi-operasi, serta bentuk-bentuk aktivitas dan operasi. Prinsip-prinsip dari kerjasama ini terbentuk atas sembilan prinsip tradisional dalam perang yang meliputi tujuan, serangan terhadap lawan, massa, kekuatan ekonomi, siasat dalam berperang, satu perintah, suatu keterkejutan dan kesederhanaan. Di dalam doktrin kerjasama ini, ada tiga tambahan prinsip yang didasarkan pada operasi-operasi yang terjadi beberapa dasawarsa belakangan ini, yakni: pengendalian, ketekunan, dan legitimasi. Prinsip-prinsip kerjasama yang

---

<sup>10</sup>Joint Publication 3-26, Counterterrorism 24 October 2014, hal. Vii, diakses dari [www.dtic.mil/doctrine/new\\_pubs/jp3\\_26.pdf](http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_26.pdf)

telah disebutkan diatas berlaku dalam setiap kegiatan dan operasi dalam *counterterrorism*, namun elemen yang paling diutamakan dalam setiap kegiatan dan operasi CT adalah tujuan dan legitimasi.<sup>11</sup>

Terdapat tiga tipe besar yang digunakan untuk aktivitas CT<sup>12</sup>, antara lain:

1. Kegiatan memberikan saran dan bantuan, merupakan usaha yang dilakukan oleh militer untuk meningkatkan kemampuan nasional lainnya dalam menyediakan keamanan bagi rakyatnya, pemerintah, penyedia layanan (birokrasi), mencegah teroris dalam menggunakan batas nasional sebagai tempat perlindungan, dan meningkatkan stabilitas regional jangka panjang. Yang termasuk didalamnya meliputi: bantuan nasional, *Foreign Humanitarian Assistance* (FHA), dan SFA
2. Aktivitas CT di luar negeri, hal ini meliputi: menyerang, bertahan, dan stabilisasi; *Counterinsurgency* (COIN); *Peace Operation* (PO); *Counterdrug Operation* ; *Noncombatant Evacuation Operation* (NEO); *Countering Weapon of Mass Destruction* (Countering WMD); *Military Information Support Operation* (MISO).
3. *Defense Support of Civil Authorities* (DSCA), DSCA adalah dukungan yang diberikan oleh angkatan bersenjata AS, warga sipil DOD, karyawan kontrak DOD, komponen aset DOD, dan pasukan penjaga nasional. DSCA meliputi: dukungan terhadap persiapan, pencegahan, perlindungan, tanggapan, dan

---

<sup>11</sup> Ibid, II-1.

<sup>12</sup>Ibid, II-4.

penyembuhan dari peristiwa-peristiwa dalam negeri seperti serangan teroris, bencana alam baik secara alami maupun bencana yang terjadi akibat ulah manusia, dan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di dalam negeri.

Dalam strategi *counterterrorism* terdapat lima pendekatan<sup>13</sup> yang berbeda diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) *Coercive counterterrorism*, pendekatan dalam mengatasi terorisme ini bergantung pada negara dengan menggunakan kekerasan (*hard power*). Negara memberikan batas-batas terhadap penggunaan kekerasan (*hard power*). Pembatasan tersebut di bentuk berdasarkan legitimasi yang diberikan negara sesuai aturan hukum, baik itu hukum nasional maupun internasional. hal ini dilakukan agar penggunaan kekerasan oleh agen-agen negara tidak melakukan tindak kriminal yang melanggar hukum pidana domestik maupun hukum internasional.
- b) *Proactive counterterrorism*, bertujuan untuk mencegah terjadinya terorisme. *Proactive counterterrorism* dilakukan dengan menggabungkan keamanan internal dan eksternal yang berhubungan dengan pergerakan orang, barang dan uang. Pendekatan ini menggunakan kombinasi *hybrid* dari *coercive counterterrorism* yakni model peradilan pidana dan model perang. Pada *Proactive counterterrorism* memiliki fokus peningkatan yang mempunyai dampak yang penting terhadap berbagai lembaga dan kebijakan-kebijakan.
- c) *Persuasive counterterrorism*, pendekatan yang melibatkan pemahaman dan segala urusan yang berkaitan dengan ide-ide yang mendasari penggunaan

---

<sup>13</sup>Terrorism Research Initiative, "Perspectives on terrorism," Volume VIII Issue 1 (2014): 2.

terorisme dalam kehidupan sosial dan politik. Hal-hal yang berkaitan tersebut diantaranya ideologi, politik, sosial, aspek-aspek budaya dan agama. *Persuasive counterterrorism* menggunakan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis melalui kebijakan para elit dan media sebagai langkah alternatif dalam menghadapi ancaman teroris.

- d) *Defensive counterterrorism*, beranggapan bahwa hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dari ancaman terorisme adalah serangan teroris dan persiapan dalam menghadapi ancaman tersebut dengan mempengaruhi variabel-variabel yang menentukan sifat serangan dan identitas targetnya. Terdapat dua pendekatan yang mendasar, yakni: *preventing attack* (pencegahan sebelum terjadinya serangan) dan *mitigating attack* (respon terhadap serangan). Tindakan preventif bertujuan untuk memperkecil resiko dari serangan teroris pada tempat dan waktu tertentu. Pendekatan yang kedua adalah untuk mengurangi dampak dari keberhasilan serangan teroris.
- e) *long-term counterterrorism*, pendekatan ini mengacu pada inisiatif yang tidak menjanjikan terhadap perbaikan yang dilakukan dengan cepat, melainkan lebih mengacu pada proses jangka panjang. Yang termasuk didalamnya “akar penyebab” dan faktor-faktor struktural yang dapat menciptakan iklim yang cocok untuk promosi dan penggunaan terorisme.

Diantara kelima pendekatan dalam strategi *counterterrorism*, Singapura cenderung menggunakan strategi *persuasive counterterrorism*. Dimana strategi ini melibatkan pemahaman dan hal-hal yang berhubungan dengan ide-ide yang mendasari aktivitas terorisme dalam kehidupan sosial dan politik. Hal-hal yang

dimaksud meliputi ideologi, politik, sosial, budaya dan aspek keagamaan. Dimana hal ini sesuai dengan MISO yakni aktivitas CT di luar negeri dimana MISO adalah bagian integral dalam pendekatan CT dalam upayanya melawan ideologi teroris.

Teroris biasanya memiliki konstituen yang meliputi para pengikut, simpatisan, rekrutmen yang potensial, pendukung baik yang aktif maupun yang pasif, dan negara yang menjadi sponsor. Begitupun *counterterrorist*, mereka memiliki konstituen yakni aktor negara yang didalamnya termasuk kementerian, lembaga-lembaga, dan birokrasi, termasuk juga pihak sekutu, serta aktor non-negara baik yang berada dalam masyarakat sipil maupun yang berada di sektor swasta, seperti para kelompok-kelompok korban, warga masyarakat, media baik lokal maupun internasional, dan para buruh yang bekerja di industri swasta maupun perusahaan-perusahaan swasta.<sup>14</sup>

Terorisme sangat erat kaitannya dengan komunikasi yang sangat aktif, seperti halnya propaganda, perang psikologis, kampanye “hati dan pikiran”, dan ide-ide yang menyediakan insentif bagi teroris untuk meninggalkan kekerasan dan mencari jalan tanpa kekerasan, merupakan sebuah gagasan bahwa kontraterorisme juga merupakan sebuah bentuk komunikasi, dimana pesan yang beredar di masyarakat ini disampaikan secara berbeda. Komunikasi teroris dilakukan dengan menggunakan wacana dan propaganda yang dapat membutuhkan pengikutnya dan merekrut orang untuk bergabung dengannya merupakan sebuah cara alternatif dan pilihan yang dipilih oleh teroris. Dengan metode sebaliknya, *counterterrorism*

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 6.



dapat membutakan para penduduk dan masyarakat umum seperti kebijakan para elit dan media, sebagai sebuah alternatif dalam membalas ancaman para teroris.<sup>15</sup>

Dalam menangani konstituen para teroris, *persuasive counterterrorism* memberikan sebuah langkah dengan mencoba untuk mempertimbangkan pandangan yang diinginkan oleh masing-masing pihak diantaranya keinginan dari individu kelompok teroris, para simpatisan, dan dukungan dari luar negeri, seperti halnya sebuah pesan dimana terorisme merupakan hal yang tidak menghasilkan sesuatu yang berguna dan masih banyak hal lain yang dapat dilakukan dan berguna untuk meraih tujuan yang ingin dicapainya. Tindakan pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang tidak diinginkan antara para teroris dan konstituennya merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan dalam strategi dengan menggunakan *persuasive counterterrorism*.<sup>16</sup>

Keamanan nasional lazim dimiliki oleh setiap negara. Suatu negara memiliki kebijakan keamanannya masing-masing. Kebijakan keamanan nasional sangat diperlukan oleh suatu negara sebab hal ini merupakan kerangka dasar sekaligus cetak biru dalam berbagai upaya menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Dalam memahami strategi yang digunakan untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara maka diperlukan pemahaman yang benar terhadap suatu ancaman. Dalam hal terorisme, suatu negara harus memberikan persepsinya mengenai ancaman terorisme untuk

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

menentukan langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menjalankan langkah-langkah dalam menanggulangi ancaman terorisme.

Pasca peristiwa 9/11 Singapura melakukan langkah-langkah yang strategis dalam menanggulangi terorisme. Dalam mengatasi tindak kejahatan di Singapura khususnya terorisme, pemerintah Singapura membentuk *Internal Security Act* (ISA). Dibawah laporan dan rekomendasi dewan penasehat ISA, pemerintah Singapura berhasil menangkap dan menahan 13 anggota JI pada tahun 2002. Dewan penasehat juga berhasil memeriksa segala hal yang berhubungan dengan pernyataan dan pengakuan serta 56 kasus yang terkait, termasuk rekaman video dari target serangan yang akan dilakukan dan mengamankan seluruh dokumen yang berhubungan dengan JI dan seluruh aktivitas-aktivitasnya.

Untuk menanggulangi ancaman terorisme di Singapura pemerintah membentuk kebijakan yang lebih kuat. Strategi yang diambil oleh pemerintah Singapura untuk menanggulangi ancaman terorisme adalah dengan melakukan penguatan keamanan nasional di Singapura yakni dengan menekankan koordinasi dan integrasi antar-lembaga yang ada di Singapura. Dengan adanya kombinasi yang efektif dari langkah pertahanan ini, Singapura percaya bahwa ancaman teror tidak akan menyerang negara kota ini.

### 3. Deradikalisasi

Kata radikal berasal dari bahasa Latin *radix* yang artinya akar atau sumber.<sup>17</sup> Namun, penafsiran radikal pada masa kini berbeda dengan konteks aslinya. Radikal sering didefinisikan sebagai sebuah faktor yang melatarbelakangi pandangan maupun tindakan ekstrim yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dalam sejarah keagamaan, pemicu munculnya radikalisme adalah adanya “fundamentalisme” dalam kehidupan beragama yang menyebabkan adanya eksklusivisme dalam pergaulan sosial. Pertumbuhan fundamentalisme agama khususnya fundamentalisme Islam saat ini, mendorong munculnya tindakan ekstrim yang memotivasi teroris untuk melakukan tindakan-tindakan untuk memperjuangkan kemurnian agamanya (jihad).

De-Radikalisasi menurut *International Crisis Group* merupakan suatu usaha untuk mengajak para teroris dan para pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Usaha yang bisa dilakukan adalah dengan diplomasi publik yang bertujuan untuk “memenangkan hati dan pikiran” mereka. Deradikalisasi menjadi populer dalam usaha kontra-terorisme yang juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses konseling yang bertujuan memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris untuk kembali kedalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Jolene Jerrard, Future challenges in fighting radicalism: Roles of non-Muslims in community engagement effort in Singapore, diakses di [www.singaporeunited.sg](http://www.singaporeunited.sg) tanggal 12 Maret 2015 pukul 19.25

Menurut *The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR) istilah *deradicalisation* dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu atau kelompok untuk melepaskan keterlibatan mereka dalam organisasi kekerasan atau kelompok teroris. Deradikalisasi secara substantif bertujuan untuk merubah tindakan dan ideologi individu atau kelompok. Sedangkan *disengagement* lebih cenderung pada memfasilitasi perubahan perilaku, melepaskan ikatan (*disengage*) dan menolak penggunaan kekerasan. Pernyataan ini merujuk pada pendapat John Horgan bahwa: “*The disengaged terrorist may not be “deradicalized” or repentant at all. Often physical disengagement may not result in any concomitant change or reduction in ideological support*”.<sup>18</sup> Pernyataan Horgan ini menyatakan bahwa dengan melepaskan ikatan (*disengagement*) yang terjalin antara teroris dengan kelompoknya hal ini tidak membuat deradikalisasi atau penyesalan perbuatannya berjalan dengan baik. Meskipun fisiknya *disengage* namun hal ini tidak langsung merubah atau mereduksi ideologi yang telah lama mereka percayai.

Definisi lain mengenai deradikalisasi menurut Golose merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi oleh paham radikal dan atau mendukung kekerasan. Program deradikalisasi bagi pelaku terorisme maupun para simpatisan diwujudkan dengan reorientasi motivasi,

---

<sup>18</sup> The International Centre for The Study of Radicalisation and Political Violence (2010), *Prison and terrorism radicalisation and de-radicalisation in 15 countries* , United Kingdom, King’s College London, hal 12.

re-edukasi, resosialisasi serta berupaya memberikan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain.<sup>19</sup>

Program deradikalisasi yang dilakukan harus bisa berupaya untuk melepaskan ideologi-ideologi dalam diri para teroris, atau berusaha untuk menghentikan penyebaran ideologi tersebut. sehingga pada saat pelaksanaan deradikalisasi upaya yang dapat diambil dalam pelaksanaannya adalah dengan melakukan deideologi. Deideologi merupakan kunci utama dalam melakukan penyadaran dan reorientasi ideologi para teroris untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama yang benar.

Langkah yang diambil oleh Singapura dalam menghadapi ancaman terorisme adalah dengan menggunakan ideologi sebagai respon terhadap serangan terorisme. Pemerintah Singapura mengakui pentingnya ideologi untuk merespon bagian integral dari langkah-langkah deradikalisasi. Mengapa pemerintah Singapura menggunakan pendekatan ideologi untuk melawan terorisme? Hal ini karena terorisme terjadi ketika kesempatan, motivasi, dan kemampuan bertemu, sedangkan pencegahan terhadap terorisme mengharuskan penghapusan paling tidak satu faktor dari tiga faktor tersebut yakni motivasi dimana hal itu sering mengarah pada ideologi.<sup>20</sup> Hal ini penting untuk dipahami bahwa peran ideologi memiliki arti yang sangat signifikan bagi Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah (JI) di Asia Tenggara.

---

<sup>19</sup> Petrus Reinhard Golose (2009), *Deradikalisasi terorisme; Humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), hal 63.

<sup>20</sup> Muhammad Hanif Bin Hassan & Kenneth George Pereire, "An Ideological Respose to Combating Terrorism – The Singapore Perspective," *Small War and Insurgencies* Vol.17, No. 4 (2006): 459.

Di Singapura pada khususnya, pemerintah telah membentuk sebuah kelompok yang mempelajari JI dan ideologinya, kemudian menawarkan pendapat dari para ahli dalam memahami JI yang telah salah dalam menafsirkan islam, dan pada akhirnya menghasilkan bahan yang diperlukan dalam mencegah ideologi itu berkembang dan kemudian melakukan edukasi umum bagi komunitas Muslim terhadap kelompok agama yang ekstrimis.<sup>21</sup>

Langkah yang diambil oleh Singapura dalam menghadapi ancaman terorisme ini merupakan langkah dari deradikalisasi, dimana pemerintah lebih mengutamakan pemahaman terhadap ideologi dengan membentuk *Religious Rehabilitation Group* (RRG) yang bekerjasama dengan komunitas Muslim di Singapura untuk melawan kesalahan yang fatal dalam memahami ideologi yang memotivasi para teroris. Disamping itu, sebagai bagian dari *soft approach* (pendekatan secara halus) pemerintah Singapura memberikan bantuan psikologis terhadap keluarga para anggota JI yang ditahan.

#### **D. Hipotesa**

Dugaan sementara yang penulis ambil untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi pemerintah Singapura dalam mengantisipasi ancaman terorisme melalui pendekatan *persuasive counterterrorism* yakni:

1. Menggunakan peran pemerintah dalam penguatan keamanan nasional di Singapura.

---

<sup>21</sup> Ibid, 461.

2. Bekerjasama dengan komunitas Muslim di Singapura dalam mencegah tindakan radikalisme dan ekstrimisme dengan membentuk Religious Rehabilitation Group (RRG) dan memberikan bantuan psikologis.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian dalam tulisan ini berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan dibahas. Dengan demikian, pembahasan dalam tulisan tidak mengalami perluasan yang dapat menyebabkan hasil dari penulisan menjadi kurang fokus, rancu, dan kurang memiliki nilai tambah.

Untuk membatasi masalah yang dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai “strategi pemerintah Singapura dalam mengantisipasi ancaman terorisme” ini dibatasi dengan menggunakan jangkauan waktu sejak tahun 2001 hingga tahun 2014. Namun di beberapa bagian tulisan ini tidak tertutup kemungkinan untuk mengulas peristiwa pada tahun-tahun sebelumnya untuk menambah data penelitian dan kepentingan penelitian. Dipilihnya tahun 2001 oleh penulis karena istilah “terorisme” mulai merebak seiring dengan kampanye anti terorisme yang digencarkan oleh AS, sedangkan tahun 2014 merupakan waktu dimana berbagai ancaman terorisme lebih sering terjadi di kawasan Asia Tenggara, serta strategi Singapura dalam menghadapi ancaman terorisme mulai dibentuk dan dijalankan demi tuntutan terhadap keamanan nasionalnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini merupakan prosedur untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dan

digunakan berdasarkan gambaran keadaan subjek yang dibuktikan dan didukung oleh data-data empiris yang ada. Tulisan ini lebih bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, majalah, dan media lain yang mendukung penelitian. Penggunaan berbagai macam domain/situs internet sebagai sumber data juga digunakan untuk menunjang tulisan ini.

### **G. Tujuan Penulisan**

Di dalam sebuah penulisan, umumnya dilakukan untuk memberikan sebuah gambaran objektif terhadap fenomena tertentu. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi geografis dan keamanan di negara-kota Singapura, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme. Kemudian hal-hal apa saja yang membuat posisi Singapura terancam dalam ancaman terorisme tersebut.
2. Menjelaskan tentang strategi Singapura dalam mengantisipasi masalah terorisme dengan cara-cara yang lebih modern dengan menggunakan pendekatan *persuasive Counterterrorism* dan de-radikalisasi.
3. Mengaplikasikan teori-teori yang penulis peroleh selama mengikuti proses perkuliahan.



## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk membahas rumusan masalah yang ada, tulisan ini dibagi kedalam 4 bab, hal ini dilakukan agar pokok permasalahan dapat dibahas secara teratur dan berkesinambungan. Sistematika dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini mendeskripsikan mengenai alasan, latar belakang masalah yang memuat tentang kondisi terkini dan gambaran tentang ancaman terorisme di Singapura, tujuan penelitian, rumusan masalah yang diperoleh sebagai pertanyaan dalam tulisan ini, kerangka teori yang digunakan sebagai keterkaitan terhadap permasalahan yang ada, hipotesis yang merupakan dugaan sementara atas kesimpulan dari tulisan ini, kemusiaan jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Terorisme Internasional dan Jaringannya Di Singapura**

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang definisi terorisme, sejarah terorisme dari awal munculnya hingga peristiwa terorisme internasional pasca peristiwa 11 September 2001. Selanjutnya rentanitas Singapura terhadap terorisme di masa lalu dan khususnya pasca peristiwa 11 September 2001 hingga saat ini. Peristiwa-peristiwa awal ini harus dipahami dalam konteks sejarah Singapura yang bertindak sebagai tonggak masa lalu Singapura.

### **BAB III: Strategi *Persuasive Counterterrorism* Pemerintah Singapura Terhadap Ancaman Terorisme**

Bab ketiga ini penulis akan membahas mengenai persepsi Singapura terhadap ancaman terorisme pada abad ke-21. Selanjutnya menjelaskan tentang strategi pemerintah Singapura dalam menghadapi ancaman terorisme melalui *persuasive counterterrorism*. Dimana dalam strategi ini, pemerintah Singapura melakukan penguatan kelembagaan keamanan nasional dipakai sebagai cara dalam mencegah terorisme di Singapura dengan lebih menekankan pada koordinasi dan integrasi antar-lembaga.

#### BAB IV: Kerjasama Antara Pemerintah dan Komunitas Muslim Singapura Dalam Menghalau Tindakan Radikalisme dan Ekstrimisme

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembentukan *Religious Rehabilitation Group* (RRG) oleh komunitas Muslim di Singapura. Bantuan psikologis yang diberikan oleh pemerintah Singapura terhadap keluarga tahanan JJ yang ditangkap.

#### BAB V: Kesimpulan

Dalam bab terakhir atau kesimpulan ini, merupakan akhir dari pembahasan yang merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya.